

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Fensius Yeri A.¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkebunan Tanman Pangan Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala- gejala yang ada atau yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat, pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian langsung berupa data wawancara langsung. serta data skunder yang diperoleh dari melalui buku, internet dan majalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan perikanan Kabupaten Kutai Barat. Adapun teknis analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan ekomomi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan perikanan yang berupa kebijakan dan kegiatan dibeberapa bidang dapat berkembang dan mencapai hasil yang diinginkan, namun terdapat bidang masih terkendala ataupun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Mengenai faktor pendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas yaitu anggaran dan fasilitas, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas mininnya nilai anggaran dan tenaga kerja lapangan.

Kata Kunci: *pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan dan kegiatan.*

Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, untuk mengurus urusan pemerintahan di daerah yang telah menjadi

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yherrydoremi@gmail.com

kewajiban dan hak dari setiap tingkatan pemerintahan sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang tertera pada undang-undang yang berlaku, dengan demikian pemerintah kabupaten kutai barat membentuk dinas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan yang menjalankan otonomi daerah dibidang pertanian yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten kutai barat.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah no 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah, dan berdasarkan pada pasal 41 menyatakan tugas pokok dinas adalah melaksanakan urusan perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan memiliki fungsi (1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, (2) pemberian dukungan dan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang teknis, (3) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis, (4) penyelenggaraan urusan di bidang BUNTANAKAN dan pelayanan umum, penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pembinaan kelompok jabatan fungsional, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya/.

Kabupaten kutai barat merupakan kabupaten yang sangat produktif dibidang pertanian dengan masyarakatnya yang mayoritas petani dan pekebun, masyarakat petani sangat bergantung pada lahan dan hasil pertanian mereka seperti padi dan makanan pokok lainnya, kemudian dengan meningkatnya produksi karet di Kutai Barata petani banyak yang mengalih fungsikan lahan mereka menjadi kebun karet namun masyarakat masih terkendala dengan ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam mengelola perkebunan dan hasil tanaman pangan mereka, kemudian bidang peternakan dinas masih belum banyak melakukan kegiatan dan program-program jitu yang mampu menarik minat masyarakat luas untuk ikut serta dalam kegiatan yang mereka laksanakan, dan dibidang perikanan masyarakat nelayan hanya mendapatkan satu kali bantuan dalam periode satu tahun kemudian nelayan tidak lagi mendapat perhatian dari pemerintah atau dalam hal ini adalah DISBUNTANKAN, dalam hal ini dinas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan masih belum banyak mengambil bagian dalam pengelolaan dan pembangunan pertanian di kabupaten Kutai Barat, dikarenakan masih ada berapa tugas dan fungsi yang belum terlaksana sepenuhnya. Namun terkadang kendala juga datang dari masyarakat sendiri karena lebih memilih mengelola lahan atau pertanian mereka berdasarkan cara tradisional dan pengalaman mereka, masih kurangnya hubungan koordinasi antara unsur pelaksana kegiatan dinas dengan masyarakat petani Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan/Implementasi

Menurut Westa (1985:17) implementasi atau pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakuakn untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus di gunakan.

Sedangkan implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berupa intruks-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan tersebut menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara.

Tugas Pokok

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Fungsi

David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donelly (1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa: “Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun tupoksi yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Kebijakan

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dari pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi yang diusulkan atau dibuat sesuai dengan masalah yang timbul dilingkungan tersebut, yang memiliki tujuan, dan sarana yang ingin dicapai.

Koordinasi

Hadari Nawawi, (1989:40), mengungkapkan Koordinasi merupakan kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Sedangkan G.R. Terry (dalam Handoko 2003:56) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasikan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dari pendapat para ahli, dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan hubungan dari usaha bersama dan juga usaha untuk berkerja sama antara badan, instansi, unit, organisasi, maupun individu, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di sepakati bersama.

Lembaga dan Organisasi

Lembaga menurut Horton dalam Nurcholis (2005:117) adalah sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan atau tata kelakuan yang dianggap penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (system a norm to achieve some goal or activity that people feel is important or more family, an organized cluster of folkways and mores centered around a major human activity). Jadi, lembaga berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Norma-norma itu berupa kebiasaan (Folkways) dan tata kelakuan (mores).

Menurut Hasibuan (2005:27) didalam sebuah organisasi terdapat berupa unsur sebagai berikut:

- a. Manusia (Human factor), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang berkerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan).
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
- c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
- d. Perkerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta ada pembagian perkerjaan.
- e. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
- f. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis.
- g. Lingkungan, artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Jadi, dari unsur-unsur yang dijelaskan diatas, SKPD atau Dinas merupakan satuan organisasi dan lembaga karena sama-sama memiliki manusia, kedudukan, tujuan, pekerjaan, struktur, teknologi dan lingkungan yang mempengaruhi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif dimana dilakukan diinā Perkebunan, Tanaman Pangan, Prternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Pengumpulan Data. analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Key informan 1 orang dan informan 6 orang. Dât sekunder diapat dengan melihat dokumen/catatan dan buku-buku yang relevan dengan fokus penlitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghimpun data dilapangan adalah penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian

Kebijakan dan Kegiatan Bidang Perkebunan

Kebijakan dan kegiatan bidang perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah atau media tumbuh lainnya, mengelola, dan memasarkan hasil tanman tersebut, kemudian kegiatan dinas, dibidang perkebunan, bantuan/ pemberian bibit sawit kepada kelompok tani kecamatan se- kabupaten kutai barat, bantuan katahana pangan di Sembilan kecamatan, penerapan teknologi pertanian (monitoring dan rapat koordinasi), peningkatan kondisi perkebunan (konsultasi dengan dinas perkebunan provinsi), operasonal bibit sawit (program peningkatan Pertanian, monitoring , pembibitan dan pembenihan. Kemudian kebijakan dan kegiatan tersebut belum dapat berjalan dengan sepenuhnya dikarenakan anggaran yang didapta leh dinas tidak cukup untuk semua kegiatan sehingga perlu untuk melakukan seleksi, kegiatan mana yang lebih menjadi prioritas, dan untuk menunjang kebijakan dan kegiatan tersebut bidang perkebunan membentuk organisasi penyuluh lapangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang telah mereka laksanakan, kemudian dinas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan telah mengembangkan hampir semua komoditi perkebunan di kabupaten kutai barat.

Kebijakan dan Kegiatan Bidang Tanman Pangan

Kebijakan dan kegiatan bidang tanman pangan adalah segala usaha yang dilakukan untuk segala jenis tanman pangan yang didalamnya terdapat kabohidrat dan protein bagi manusia, tanman pangan juga merupakan makana pokok untuk itu pemerintah membuat kebijakan dan kegiatan untuk mengelola dan dalam upaya meningkatkan hasil panen yang berupa, optimalisasi lahan tanman padi, pengembangan jaringan integrasi tanaman padi, pengembangan kedelai, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan tanman pangan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan semua kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, kemudian dalam pelaksanaannya dinas melakuakn koordinasi dengan kantor ketahanan pangan, untuk kemudian dilanjutkan badan penyuluh pertanian yang mengawasi dan membina langsung para tenai di setiap kampng. Namun dalam pelaksanaannya dinas maupun kantor ketahanan pangan masih memiliki kendala dengan minimnya aparatur yang memiliki sumberdaya manusi serta jumlah penyuluh yang masih kurang dan masih mininya koordinasi yang ada antara dinas dan kantor ketahanan pangan yang seringa mengakibatkan salah paham antar aparatur, serta danan yang minim membuat bantaun yang diberikan hanya untuk tahun pertama dan memaksa masyarakat untuk bias mandiri.

Kebijakan dan Kegiatan Bidang Peternakan

Kebijakan dan kegiatan bidang peternakan adalah segala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumsi masyarakat akan daging, dengan cara mengelola dan mengolah/ memasarkan dan pengelolaan hasil, kemudian untuk memenuhi hal tersebut dinas membaut kebijakan, memelihara rumah potong hewan (memebersihkan, mengontrol penggunaan gedung), peningkatan populasi ternak dengan kawin suntik sekaligus memonitoring kegiatan kawin suntik, penghijauan lahan pakan, pelatihan vaksinasi, pengembangan budidaya sapi (bali dan Brahman Cross) dan penanganan reproduksi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat manangulngai kebutuhan pasar akan daging, namun kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan hanya terkhususkan pada pengadaan dan perawatan sapia saja, hal ini dikarekan untuk periode tahun ini di fokuskan hanya untuk kegaitan tersebut namun dari kebijakan ini masih ada yang perludi tambahkan yaitu tetang pengawasan dan pengendalian baik itu kegiatan maupun hasil. Kemudian dengan tingginya permintaan pasar akan daging yang mempengaruhi populasi ternak yang ada di kabupaten Kutai Barat dinas tenlah mengembangkan juga jenis ternak lainnya seperti, kerbau, kambing, ayam buras, ayam pedaging, itik, untuk mengendilkan kebutuhan konsumsi rumah tangga masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan hasil temuan di lapangan yang dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Kegiatan Perkebunan Yang dilaksanakan oleh Dinas, dalam hal ini adalah Bidang Perkebunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengusahakan, mengolah dan mengelola serta memasarkan barang dan jasa hasil tanaman perkebunan juga untuk meningkatkan sumberdaya manusia petani kebun melalui ilmu pengetahuan, teknologi, pelatihan perkebunan, permodalan serta manajemen untuk meningkatkan hasil produksi serta nilai jual pasar. Adapun pemberian bantuan itu sendiri merupakan permohonan yang diajukan oleh masyarakat melalui kelompok-kelompok tani, Kemudian dalam pelaksanaannya dinas melakukan seleksi guna melihat tanaman perkebunan, kebijakan dan kegiatan yang sesuai, serta memprioritaskan daerah yang belum pernah diberikan bantuan, kemudian untuk hasil kebijakan dan kegiatan, yang dilaksana belum banyak yang terlihat dikarenakan penganggaran dan perencanaan terbatas pada bantuan hibah dan pengembangan perkebunan.
2. Kebijakan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh dinas, dalam hal ini adalah bidang Tanman pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan hasil produksi petani, nilai jual pasar serta meningkatkan sumberdaya manusia petani melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan pelatihan, juga untuk mengoptimalisasi lahan tanman pangan, dengan bantuan berupa pembibitan dan pupuk. Dan

untuk panen, pengelolaan hasil serta penanaman kembali diberikan kebebasan penuh kepada masyarakat petani, menggunakan kemandirian kelompok tani sendiri. Kemudian untuk bantuan yang diberikan melalui permintaan dan permohonan dari kelompok tani kepada dinas. Kemudian pelaksanaannya dinas dalam hal ini bidang tanman pangan mengalami kendala dengan waktu panen yang lama sehingga bantuan hanya samapai pada penanaman dan perawatan awal saja, kemudian masih banyak masyarakat yang menggunakan cara tradisional untuk penanaman, perawatan dan pengelolaan hasil.

3. Kebijakan dan kegiatan bidang peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Tanman Pangan, Peternakan dan perikanan merupakan kebijakan untuk meningkatkan sector peternakan di Kabupaten Kutai Barat melalui peningkatan mutu dan kualitas ternak dan minat petani untuk berternak, hingga mampu mengendalikan kebutuhan pasar akan daging serta peningkatan sumberdaya manusia peternak melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan organisasi penyuluh, serta dalam upaya memanfaatkan lahan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi setelah kegiatan pertambangan. Kemudian kendala yang dialami adalah minat masyarakat yang masih kurang untuk beternak, kemudian kebutuhan akan daging juga hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti hari raya dan lain-lain sedangkan untuk hari biasa sangat kurang. kedua masalah lainnya yang sering dialami adalah banyak masyarakat tani yang setelah diberikan bantuan tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh dinas, seperti benih yang seharusnya menjadi indukan dan kemudian di jual oleh kelompok tani tersebut.
4. Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas, dalam hal ini bidang perikanan adalah untuk mengendalikan kebutuhan pasar akan ikan, perusakan habitat ikan, serta menjaga ekosistem perikanan melalui budidaya, kemudian tujuan lainnya adalah pemanfaatan lahan strategis dan juga pemanfaatan lahan pasca tambang untuk budidaya perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan melalui anggaran dan permodalan dari pemerintah hal ini juga mempengaruhi nilai ekonomi nelayan, adapun bantuan yang diberikan berdasarkan daerah atau kampung dari kelompok tani yang meminta bantuan apakah cock diberikan keramba apung tau hanya untuk kolam terpal di halaman rumah, kendala yang sering dialami adalah banyak masyarakat nelayan yang setelah diberikan bantuan tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh dinas, seperti benih yang seharusnya menjadi indukan dan kemudian di jual oleh kelompok tani tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat penulis, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Perlu adanya perencanaan yang matang tentang kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan sampai tuntas sesuai dengan anggaran dan yang paling diprioritaskan.
2. Menambah jumlah tenaga kerja serta meningkatkan mutu dan pendidikan aparatur dinas dan penyuluh lapangan.
3. Peningkatan komoditi-komoditi unggulan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kebijakan dilapangan.
5. Melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat petani dan kelompok tani tentang bantuan atau kegiatan apa yang mereka perlukan.
6. Pembagian pupuk dan pestisida bersubsidi atau pelatihan pembuatan pupuk kompos bagi masyarakat petani kurang mampu ataupun kelompok tani yang mampu untuk mandiri.
7. Bantuan sarana dan prasaran seperti jarring, pukat kepada nelayan dan masyarakat yang mengembangkan komoditi unggulan seperti pemebrian pupuk, alat sadap, wadah untuk gedah karet, dan sarana untuk komoditi unggulan lainnya.
8. Pemabnagunan fasilitas untuk pengeloalan hasil bidang perkebunan, seperti pabrik karet dan kelapa sawit.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, solichin. 1997. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharshimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baduddu, Js dan Zain, Muhammad Sultan. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan publik. Yogyakarta: P.T. Hanindita graham Widya.
- Gibson, Ivancevich dan Donelly. 1993. Organizations. Jakarta: Erlangga..
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koryati, Nyimas Dwi, Hidayat, Wisnu dan Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yokyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Meleong, Lexy J. 2006, Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moekijat. 1998. Kamus Kepegawaian Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari. 1989. Administrasi Pendidikan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan praktek pemerintah dan otonomi daerah. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1982. Peranan Staf Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2006. Manajemen Jakarta: Kencana.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Dokumen-Dokumen:

- Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Uraian Jabatan Struktural Dinas Perkebunan, Tanman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

Sumber Internet:

- Qarni, Muhammad Uwais Al. 2013. Pelaksanaan.
<http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>
(Diakses Pada 7 Juni 2015)
- [http://www.disbuntanakankubar.comoj.com/Ubah%20Cara%20Lama%20Peme
lihaaran%20Ternak.html](http://www.disbuntanakankubar.comoj.com/Ubah%20Cara%20Lama%20Peme%20lihaaran%20Ternak.html)
(Diakses Pada 3 Juni 2015)